

ABSTRAK

REKONSTRUKSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERIZINAN AMDAL DI INDONESIA

Muhammad Yusuf Muda Azka 2310622052, Irwan Triadi, Slamet Tri Wahyudi

Latar Belakang: Proses perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait partisipasi masyarakat yang bermakna, khususnya pasca implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan: Penelitian ini menganalisis urgensi rekonstruksi mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan AMDAL dan mengusulkan kerangka regulasi ideal untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan. Metode: Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan sekunder (literatur hukum dan artikel ilmiah). Hasil: Studi menunjukkan bahwa implementasi UU Cipta Kerja telah membatasi ruang partisipasi masyarakat secara signifikan, membatasi keterlibatan hanya pada masyarakat terdampak langsung sambil mengecualikan pemerhati lingkungan dan organisasi masyarakat sipil dari proses AMDAL. Transisi dari Komisi Penilai AMDAL menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup semakin memusatkan otoritas pengambilan keputusan dan mengurangi representasi masyarakat. Kesimpulan: Rekonstruksi mekanisme partisipasi masyarakat sangat mendesak untuk memulihkan keterlibatan masyarakat yang bermakna, mengimplementasikan prinsip tata kelola lingkungan yang baik, dan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan pemangku kepentingan yang inklusif dalam proses penilaian dampak lingkungan.

Kata Kunci: Analisis Dampak Lingkungan, Partisipasi Masyarakat, Hukum Lingkungan, Tata Kelola Yang Baik, Keterlibatan Masyarakat.

ABSTRACT

Reconstruction of Public Participation in The AMDAL Licensing Process in Indonesia

Muhammad Yusuf Muda Azka 2310622052, Irwan Triadi, Slamet Tri Wahyudi

Background: The Environmental Impact Assessment (AMDAL) licensing process in Indonesia faces significant challenges regarding meaningful public participation, particularly following the implementation of the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). Objective: This research analyzes the urgency for reconstructing public participation mechanisms in AMDAL formation and proposes ideal regulatory frameworks for enhanced community involvement in environmental decision-making processes. Methods: This normative legal research employs conceptual and statutory approaches, utilizing qualitative descriptive analysis of legal materials including primary sources (legislation and court decisions) and secondary sources (legal literature and scholarly articles). Results: The study reveals that post-Job Creation Law implementation has significantly restricted public participation scope, limiting involvement to only directly affected communities while excluding environmental advocates and civil society organizations from AMDAL processes. The transition from AMDAL Assessment Commission to Environmental Feasibility Assessment Team has further centralized decision-making authority and reduced community representation. Conclusion: Reconstruction of public participation mechanisms is urgently needed to restore meaningful community involvement, implement good environmental governance principles, and ensure transparency, accountability, and inclusive stakeholder engagement in environmental impact assessment processes.

Keywords: *Environmental Impact Assessment, Public Participation, Environmental Law, Good Governance, Community Involvement.*